

Strategi Pembentukan Kewarganegaraan Ekologis

Mariyani

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Pos-el: mariyani573@gmail.com

Abstrak

Isu kerusakan lingkungan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian mengglobal di hampir semua negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini mengalami isu kerusakan lingkungan terutama akibat perkembangan kemajuan industri di kota besar seperti pembalakan hutan tanpa tebang pilih, pembuangan limbah tanpa pengelolaan, hingga kurangnya pembangunan fisik yang seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan meliputi promosi pemerintah yang kurang dalam menggiatkan peran warga negara terhadap lingkungan, peran persekolahan yang belum optimal dalam pembelajaran berbasis lingkungan hingga kesadaran dan perilaku warga negara yang masih kurang dalam menjadi kewarganegaraan ekologis. Warga negara yang baik tidak hanya memiliki pengetahuan dan partisipasi aktif saja tetapi juga memiliki watak kewarganegaraan yang peduli lingkungan. Oleh karena itu pentingnya upaya membentuk kewarganegaraan ekologis yang hakikatnya ialah tata cara etika dan moral warga negara terhadap lingkungannya secara bertanggung jawab mampu bijaksana dalam menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan. Tujuan tulisan ini ialah untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan dalam pembentukan kewarganegaraan ekologi. Metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah kajian pustaka (*library research*). Tulisan ini akan membahas tentang strategi dalam pembentukan kewarganegaraan ekologi yang meliputi 1) pembentukan kewarganegaraan ekologi melalui persekolahan mulai dari guru melek ekologi, PKn persekolahan berbasis *ecoliteracy* dan proyek di luar kelas dan 2) pembentukan kewarganegaraan ekologi berbasis masyarakat melalui komunitas lingkungan, *workshop* tentang pentingnya pelestarian lingkungan, dan pelatihan mengenai pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan.

Kata kunci: Guru melek ekologi, kewarganegaraan ekologis, PKn berbasis *ecoliteracy*, ekologi berbasis masyarakat.

Pendahuluan

Fenomena globalisasi membawa dampak pada kecenderungan yang bersifat global. Semua kejadian menjadi tidak mengenal batas teritorial. Beberapa isu global juga menjadi permasalahan utama di setiap negara. Salah satu isu global yang menjadi permasalahan hampir setiap negara ialah isu kerusakan lingkungan. Greenpeace sebagai salah satu organisasi yang fokus terhadap isu lingkungan di dunia menjelaskan bahwa ada beberapa kasus kerusakan lingkungan seperti *illegal logging*, pembakaran hutan, kerusakan ekosistem laut, pengelolaan limbah industri, isu nuklir bahkan detox yang menjadi permasalahan semua negara di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini mengalami isu kerusakan lingkungan terutama akibat perkembangan kemajuan industri di kota besar. Hal ini diperkuat oleh Nagra (2010:155) bahwa pada abad ini kerusakan lingkungan merupakan bencana global bagi setiap negara karena dampaknya melewati batas teritorial. Beberapa kasus yang menunjukkan bukti bahwa terjadi perilaku yang merusak lingkungan di Indonesia ialah pembuangan sampah sembarangan, kasus pembalakan hutan secara liar, pembuangan limbah pabrik yang mencemari lingkungan hingga kurangnya pembangunan fisik yang seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan.

Uraian kasus perusakan lingkungan harusnya tidak terjadi mengingat bahwa pemerintah melalui UU No

23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH) Pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan. Hak tersebut diatur oleh secara jelas agar warga negara mampu berperan dalam melestarikan lingkungan. Akan tetapi walaupun secara hukum diatur tetapi kesadaran akan pelestarian lingkungan masih sangat minim. Kurangnya kesadaran tersebut memperparah krisis ekologi yang terjadi terutama di perkotaan. Krisis ekologi tersebut terjadi disebabkan oleh perilaku warga negara yang salah. Hal ini diperkuat oleh Prasetyo dan Budimansyah (2011: 175) bahwa penyebab utama kerusakan lingkungan ialah kurangnya kesadaran warga negara dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Selain dari kurangnya kesadaran juga disebabkan oleh perilaku warga negara yang salah terhadap lingkungan.

Uraian tersebut jelas menunjukkan bahwa hak warga negara dalam menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan di sekitar yang sering dikenal dengan istilah kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*). Istilah “kewarganegaraan ekologis” pertama kali digunakan pada tahun 1990 oleh institusi lingkungan di Kanada. Berdasarkan institusi lingkungan Kanada tersebut mengemukakan bahwa sebagian warga dunia yang mengglobal tidak memiliki sejarah yang baik dalam upaya mengelola lingkungan sekitar dengan baik. Pengalaman dari lembaga tersebut menunjukkan bahwa sebelumnya sumber daya alam

di negara tersebut diberikan kepada berbagai pihak untuk mengelola akan tetapi, sering disalahgunakan sehingga menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap lingkungan.

Hakikatnya kewarganegaraan ekologis ialah gagasan baru yang di upayakan untuk membentuk kesadaran warga negara dalam membentuk manusia seutuhnya dalam keterlibatan menjaga pelestarian lingkungan hidup Deane Curtin (Isin dan Turner, 2002:297). Oleh karena itu, harusnya pemerintah bersama institusi lingkungan yang ada mendorong untuk membentuk warga negara yang peduli terhadap lingkungan. Hakikatnya pentingnya membentuk warga negara ekologi melalui komitmen pribadi untuk belajar lebih banyak tentang lingkungan kemudian mampu mengambil tindakan dalam menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan yang bertanggung jawab (Szerszynski 2006:75).

Peran pemerintah dalam mempromosikan peran warga negaranya sangatlah penting dikarenakan pemerintah mempunyai alat yang bersifat memaksa, mengikat dan memberikan sanksi kepada warga negaranya untuk menjaga lingkungan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Barry (2006:21) bahwa kampanye berbasis negara sangat efektif untuk mempromosikan kewarganegaraan lingkungan tanpa mengabaikan dimensi sosial-ekonomi dan politik dari keberlanjutan. Akan tetapi, di beberapa negara menunjukkan bahwa kurangnya perhatian lebih pemerintah untuk menempatkan isu lingkungan dalam konteks yang lebih luas dalam kehidupan warga negaranya. Konsep pembentukan warga negara hanya didorong untuk menjadi "warga negara yang baik" tanpa memberikan penjelasan lebih mengenai peran warga negara yang baik sebagai warga negara ekologis. Selain itu faktor lain penghambat terbentuknya warga negara ekologi ialah kurangnya keadilan yang diberikan terhadap aktor perusak lingkungan seperti struktur kekuasaan dan ekonomi kapitalis yang menjadi aktor dalam menimbulkan masalah ekologi dan sosial. Faktor ketidakadilan tersebut juga di perkuat oleh Luque (2005:221) menunjukkan bahwa warga negara menjadi tidak peduli dengan informasi yang disampaikan pemerintah mengenai krisis ekologi dikarenakan warga negara mengidentifikasi terjadinya ketidakadilan terhadap kekuasaan perusahaan kapitalis yang tidak memberikan kontribusi dalam menangani krisis ekologi melainkan lepas tanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan di lingkungan. Sistem pendidikan melalui lembaga sekolah dan peran serta masyarakat juga masih sangat minim terhadap pembahasan untuk pembentukan kewarganegaraan ekologis. Hal ini dikarenakan persekolahan masih dibebankan pada upaya pembentukan pengetahuan saja dan masyarakat belum memiliki kesadaran yang cukup.

Minimnya promosi pemerintah, keterbatasan peran sekolah mengenai upaya pembentukan warga

negara ekologi dan kurangnya kesadaran warga negara dalam perannya sebagai kewarganegaraan ekologis membuat isu lingkungan menjadi tidak mendapatkan perhatian lebih dalam masyarakat. Beban berat dalam menjaga lingkungan hanya dibebankan pada lembaga lingkungan tertentu saja organisasi dalam kementerian lingkungan hidup, komunitas *go green*, komunitas peduli lingkungan. Padahal upaya membentuk warga negara yang ekologi sangatlah penting dikarenakan peran warga negara tersebut akan mampu membentuk warga negara yang siap berperan dan bertanggung jawab dalam menjawab tantangan isu-isu lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka jika melihat konsep pendidikan kewarganegaraan jelas bahwa warga negara yang baik haruslah mampu mengembangkan tiga ranah kompetensi kewarganegaraan yaitu *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic disposition*. Hal itu juga diperkuat oleh Cogan & Derricott, (1998:2-3) bahwa warga negara saat ini haruslah memiliki karakteristik multidimensional yang memiliki ciri memiliki jati diri; kebebasan untuk memperoleh hak-hak tertentu; pemenuhan terkait kewajiban-kewajiban; minat dan keterlibatan dalam urusan publik; dan kepemilikan nilai-nilai dasar kemasyarakatan disinilah salah satu konsep untuk membentuk warga negara yang ekologis melalui peran pemerintah, persekolahan maupun peran masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam mengembangkan kewarganegaraan ekologi. Tulisan ini berfokus pada beberapa kajian meliputi 1) konsep kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*); 2) pembentukan kewarganegaraan ekologis melalui persekolahan mulai dari guru melek ekologi, PKn persekolahan berbasis *ecoliteracy* dan proyek di luar kelas dan 3) pembentukan kewarganegaraan ekologis berbasis masyarakat melalui komunitas lingkungan, *workshop* tentang pentingnya pelestarian lingkungan, dan pelatihan mengenai pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan.

Metode

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian tinjauan pustaka (*library research*) yang bersumber baik dari jurnal maupun buku yang terkait mengenai gagasan strategi pembentukan kewarganegaraan ekologis. Beberapa referensi akan menjadi sumber gagasan utama dalam penulisan artikel ini.

Konsep Kewarganegaraan Ekologis (*Ecological Citizenship*)

Pembahasan masalah-masalah lingkungan di Indonesia telah lama berlangsung akan tetapi upaya yang dilakukan oleh elemen masyarakat melalui komunitas pemergerak lingkungan ataupun pemantapan pengetahuan tentang pentingnya isu lingkungan di sekolah juga belum optimal. Hal itu di tunjukkan di dalam ruang lingkup materi pembelajaran di sekolah terutama dalam pembelajaran PKn persekolahan masih

sangat minimal. Oleh karena, itu penting pemahaman mengenai konsep kewarganegaraan ekologis.

Kewarganegaraan ekologis hakikatnya memiliki motivasi, kepercayaan diri, kesadaran nilai-nilai, kebijaksanaan praktis dan kemampuan untuk menemukan kewarganegaraan seseorang yang melekat ekologi ke dalam tindakan. Kewarganegaraan ekologis melibatkan pemberdayaan warga negara untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan tujuan mereka sehubungan dengan lingkungan serta mampu bertindak sesuai pengetahuannya tentang konsekuensi yang akan terjadi (Berkowitz, et. al., 2005:228).

Selain pendapat di atas, definisi kewarganegaraan lingkungan hakikatnya juga meliputi pemahaman tentang isu-isu ekologi, hak-hak, tanggung jawab warga negara dalam isu lingkungan hidup dan tindakan yang dilakukan tidak hanya mengatasi masalah lingkungan tetapi juga untuk mempromosikan interaksi manusia yang positif dan berkelanjutan dengan lingkungan sekitar (Berkowitz dkk, 2005:227; Clarke & Agyeman, 2011:1775; Latta, 2007:18; Gabrielson & Cawley, 2010:605; Gebbels, Evans, & Delany, 2011:13). Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya upaya bersama baik melalui pemerintah, persekolahan maupun masyarakat haruslah mengefektifkan upaya dalam pembentukan kewarganegaraan ekologis. Kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*) ialah pemikiran ataupun ide yang berkaitan erat dengan tata cara etika dan moral warga negara terhadap lingkungannya secara bertanggungjawab mampu bijaksana dalam menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan.

Kurangnya pemahaman mengenai tumpang tindih terhadap kewarganegaraan melekat ekologi dan kewarganegaraan melekat huruf yang berakibat warga negara di satu sisi paham terhadap konsep melekat ekologi tetapi di satu sisi belum mampu bertindak terhadap lingkungan. Berkowitz, et. al (2005:230) kerangka kewarganegaraan lingkungan meliputi lima komponen yang harus dikembangkan agar tidak terjadi tumpang tindih sebagai berikut 1) melekat kewarganegaraan meliputi sistem sosial, ekonomi, budaya, dan politik kunci pemahaman menggunakan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan; 2) melekat ekologi meliputi pemahaman sistem ekologi dan menggunakan pemikiran ekologi tetapi juga harus mampu memahami hubungan ekologi dengan masyarakat; 3) nilai kesadaran yang berarti kesadaran nilai-nilai pribadi sehubungan dengan lingkungan dan kemampuan untuk menghubungkan nilai-nilai ini dengan pengetahuan dan kebijaksanaan praktis untuk membuat keputusan dan bertindak; 4) efikasi diri yang berarti memiliki kapasitas untuk belajar dan bertindak sehubungan dengan nilai-nilai pribadi dan kepentingan di lingkungan dan 5) kebijaksanaan praktis yang berarti

memiliki kebijaksanaan dan keterampilan praktis untuk pengambilan keputusan dan bertindak sehubungan dengan lingkungan. Kewarganegaraan ekologis bertujuan untuk mempromosikan secara global untuk membentuk warga negara yang melekat lingkungan, mampu bertindak secara bertanggung jawab terhadap perilaku yang mampu menunjukkan respons positif terhadap berprilaku dan berinteraksi dengan lingkungan dengan baik.

Pembentukan Kewarganegaraan Ekologis Melalui Persekolahan Mulai Dari Guru Melekat Ekologi, PKn Persekolahan Berbasis Ecoliteracy dan Proyek di Luar Kelas

Pendidikan merupakan tonggak awal untuk membentuk manusia yang tidak tahu menjadi tahu melalui pengalaman dan perubahan tingkah laku. Berawal dari ide gagasan dari Jhon Dewey (1916) yang mengemukakan bahwa pengalaman pendidikan yang dimaksud ialah alat untuk perubahan sosial. Perubahan sosial yang dikemukakan salah satunya ialah isu lingkungan atau ekologi. Pengalaman yang dimaksud didapat melalui peran pembelajaran dalam hal ini mata pelajaran PKn. Untuk mencapai tujuan dari perubahan sosial di dalam persekolahan maka salah satu hal yang dapat dilakukan ialah melalui pembelajaran yang aktif dengan melibatkan partisipasi aktif peserta didik sehingga mampu kritis dan respon terhadap isu-isu lingkungan.

Perubahan paradigma lama menjadi baru saat ini membantu para ahli pendidikan untuk menyediakan program pendidikan yang tidak hanya transfer ilmu pengetahuan saja tetapi juga mampu menghasilkan perubahan perilaku. Dengan kata lain, jika hanya fokus akan pengetahuan maka tidak akan menyediakan warga dengan keterampilan untuk memerangi masalah lingkungan (Clifton, Mauney & Falkner, 1998). Hal ini menunjukkan bahwa membentuk kewarganegaraan ekologi dapat dilakukan melalui persekolahan dengan melibatkan langsung siswa sehingga mampu menghayati dan mengamalkan kompetensi kewarganegaraan yang di harapkan. Secara terperinci dalam pembelajaran PKn ada tiga kompetensi kewarganegaraan yang di kembangkan dan bersifat jejaring. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*) menurut Doganay (Murray, 2012:31-32) bahwa ketiga kompetensi mulai dari *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* tersebut berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Dalam hal ini tercapainya ketiga kompetensi tersebut merupakan sasaran akhir dari pendidikan kewarganegaraan. Tetapi saat ini kompetensi yang berkembang masih dominan oleh aspek kognitif. Ketiga kompetensi secara utuh harus dikembangkan sehingga mampu mencapai tujuan terbentuknya kewarganegaraan ekologis. Peran pembelajaran PKn dalam hal ini sangatlah besar mengingat pembentukan kewarganegaraan ekologis tersebut dapat dibentuk secara efektif

melalui pengembangan ketiga kompetensi. Akan tetapi dalam ruang lingkup pembelajaran PKn persekolahan sendiri juga masih sangat minim yang membahas materi tentang peduli lingkungan. Penulis hanya akan mengambil ruang lingkup jenjang SMP Kurikulum 2013 untuk dijadikan salah satu contoh. Minimnya ruang lingkup materi dalam pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Ruang Lingkup Materi PKn SMP

Kelas	Materi Pokok
VII	Proses perumusan Pancasila, norma, sejarah perumusan dan pengesahan UUD NRI 1945, Keberagaman SARA, bentuk kerjasama, karakteristik daerah dalam kerangka NKRI
VIII	Pancasila sebagai dasar negara, kedudukan dan fungsi UUD NRI 1945, tata urutan peraturan perundang-undangan, makna kebangkitan nasional, nilai dan semangat sumpah pemuda, semangat dan komitmen kebangsaan kolektif
IX	Praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara, pokok pikiran UUD NRI 1945, prinsip harmoni keberagaman SARA, konsep cinta tanah air.

Sumber: diolah dari KI dan KD SMP/MTS Kemendikbud 2016

Dari tabel di atas, hasil analisis penulis melalui kompetensi inti dan dasar bahwa untuk jenjang sekolah menengah hanya satu kompetensi dasar yang membahas mengenai isu lingkungan di kelas IX pada KD. 3.6 Mengkreasi konsep cinta tanah air/bela negara dalam konteks NKRI, dan 4.6 Mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan konsep cinta tanah air dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Ada beberapa peran persekolahan yang akan penulis paparkan dalam upaya membentuk kewarganegaraan ekologi.

Pembentukan Guru yang Melek Ekologis

Penulis berasumsi bahwa sebelum mengembangkan kewarganegaraan ekologi pada siswa maka guru haruslah memiliki pemahaman yang kuat dalam konsep ekologi dan memiliki keterampilan untuk mengembangkan nilai-nilai melek ekologi. Guru memiliki potensi untuk mempengaruhi warga lingkungan siswa terutama pengetahuan mereka, nilai-nilai, keyakinan dan tindakan terhadap lingkungan (Hungerford, 2010:8; Yavetz, Goldman, & Pe'er, 2009:393).

Namun, karena pembahasan isu lingkungan masih minim diintegrasikan ke dalam kurikulum sehingga bergantung pada kebijaksanaan guru dan di dasarkan pada keyakinan dan pengalaman pribadi (Hart, 2003: 50). Guru yang memiliki pengalaman terbatas, berpartisipasi dalam warga lingkungan kemungkinan besar tidak akan memasukkannya dalam pengajaran

mereka. Oleh karena itu, beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa guru harus mempersiapkan diri untuk membentuk warga negara ekologi (Beckford 2008:55; Ferreira, Ryan, Davis, Cavanagh & Thomas, 2009:75). Hal ini dapat dilakukan guru melalui eksplorasi metode-metode pedagogis yang paling mungkin untuk mempermudah membentuk warga negara bijaksana dan mampu memecahkan masalah yang efektif terhadap isu lingkungan (Short, 2010:34).

Di beberapa negara telah mengupayakan bahwa pentingnya memasukkan program kelestarian lingkungan dalam program guru agar nanti mampu dikembangkan dalam pembelajaran. Salah satu negara yang telah melakukan program untuk guru ini ialah Australia melalui program *project citizen*-nya yang membahas isu-isu lingkungan. Tujuan program ini ialah (1) promosi ekologi dan melek ekologi; (2) penekanan praktek berbasis tempat, dan (3) keterlibatan guru dalam keterlibatan sipil dalam pemecahan masalah isu lingkungan. Salah satu upaya pemerintah ialah mempromosikan praktek pengajaran yang berkelanjutan berorientasi aksi. Menurut ini Kelly (2012: 8) bahwa guru harus memiliki keyakinan mereka sendiri dan menyelaraskan keyakinan mereka dengan hasil yang dipromosikan melalui perilaku yang berkelanjutan. Dengan demikian bahwa kebutuhan yang jelas untuk guru menerima bimbingan eksplisit dalam mengembangkan rencana yang memberdayakan siswa untuk bertindak dengan cara bertanggung jawab terhadap lingkungan (Gooch, et. al., 2008:185).

Pentingnya memberikan pemahaman guru agar melek ekologi juga di dukung hasil penelitian Kelly (2012) bahwa a) guru di bidang kewarganegaraan keaksaraan, belajar bagaimana kebijakan publik dapat digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan melalui proses mencari opini publik, terlibat dengan para pejabat untuk memahami kebijakan yang ada, mengembangkan kebijakan baru, dan mempresentasikan rencana mereka kepada para pengambil keputusan; b) melalui penyelidikan kritis, melek ekologi berevolusi dari umum ke pemahaman tempat tertentu, terutama dalam hal seluk-beluk sosial, ekonomi, politik, dan budaya seperti lebih memahami arti penting pelestarian lingkungan; c) melalui partisipasi proyek, guru menjadi lebih sadar nilai-nilai mereka sendiri dan nilai-nilai lain, yang mendorong aksi berkelanjutan mereka atas nama masalah lingkungan; dan d) guru menunjukkan komitmen profesional mereka terhadap pembentukan kewarganegaraan ekologi berorientasi aksi dengan merancang kebijakan pendidikan dan kampanye. Jika kita ingin guru untuk menghubungkan siswa dengan lingkungan alam dan komunitas mereka, maka penting untuk mengekspos semua guru masa depan untuk proyek-proyek aksi masyarakat yang meminta mereka untuk secara kritis menilai hubungan utuh, pola budaya, dan politik yang menyebarluaskan masalah ekologi.

Pembentukan Kewarganegaraan Ekologis melalui PKn Berbasis Ecoliteracy

Gagasan kesadaran terhadap lingkungan hidup (*ecoliteracy*) menjadi perhatian yang sangat serius sehingga segala upaya dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan dapat melalui pembelajaran PKn berbasis *ecoliteracy*. Pemahaman terhadap gagasan akan pentingnya kesadaran ekologis agar menciptakan keseimbangan antara kebutuhan warga dunia dengan kemampuan bumi untuk menopangnya. Pemahaman seperti itu juga disebut dengan melek ekologi. Melek ekologi (*ecoliteracy*) dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan pemahaman ekologi, berpikir dan kebiasaan pikiran untuk belajar peduli lingkungan (Berkowitz, 2005:253).

Gagasan *ecoliteracy* tersebut dapat diintegrasikan dalam semua mata pelajaran salah satunya PKn. Menurut (Dasim dan Prsetiyo, 2016:182) bahwa gagasan *ecoliteracy* dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan 3 jalur meliputi: 1) pendidikan tentang lingkungan yang dapat dilakukan melalui pengembangan materi pembelajaran yang membahas isu lingkungan. Tahap ini bertumpu pada pengembangan aspek kognitif. Salah satu pendekatan yang tepat ialah penemuan informasi (*discovery*); 2) pendidikan tentang dari lingkungan yang berarti sumber belajar yang digunakan identik dengan lingkungan sekitar; 3) pendidikan untuk lingkungan yang berarti pembelajaran ini tidak hanya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan tetapi juga keterlibatan nilai yang membentuk perilaku. Tujuannya ialah menekankan pada kesadaran untuk berperilaku yang menjadi kebiasaan.

Sejalan dengan pendapat di atas bahwa gagasan tersebut selaras dengan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran PKn yang meliputi 1) pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang berkaitan dengan pemahaman yang harus dimiliki warga negara; 2) keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) kecakapan intelektual dan partisipasi aktif warga negara dan 3) watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang berarti pembentukan karakter yang mengembangkan nilai-nilai kebajikan salah satunya karakter peduli lingkungan.

Oleh karena itu gagasan *ecoliteracy* tersebut dapat kita susun dalam pembelajaran PKn yang disesuaikan dengan kompetensi inti gagasan *ecoliteracy* dan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang termuat dalam kurikulum yang disesuaikan. Kompetensi inti tersebut meliputi kognitif, afektif, psikomotor dan hubungan antara sekitar (*the center for ecoliteracy*). Salah satu kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dapat dikembangkan melalui gagasan *ecoliteracy* ialah di kelas IX pada KD. 3.6 Mengkreasi konsep cinta tanah air/bela negara dalam konteks NKRI, dan 4.6 Mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan konsep cinta tanah air dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Berikut penulis berupaya membuat keterkaitan kompetensi dasar melek ekologi dengan kompetensi dasar yang sesuai dengan upaya pembelajaran berbasis *ecoliteracy* sebagai berikut.

Tabel 2. Keterkaitan Kompetensi Dasar Melek Ekologi dengan Kompetensi Dasar Pembelajaran

No	Set of Core Competency from The Center for Ecoliteracy	Indikator Keberhasilan
1	Head (kognitif)/civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan) a) Pendekatan isu dari berbagai perspektif b) Pemahaman terhadap prinsip utama ekologis c) Berpikir kritis, pemecahan masalah yang kreatif, dan mampu menggunakan pengetahuan ke dalam situasi baru	a) Peserta didik mencari informasi mengenai kasus kerusakan lingkungan yang ada di sekitar b) Peserta didik dapat mengklasifikasikan kerusakan yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah c) Peserta didik mengidentifikasi indikator penyebab kerusakan lingkungan d) Peserta didik dapat menjelaskan akibat kerusakan lingkungan
2	Hands (aktif)/civic skills (keterampilan kewarganegaraan) a) Membuat dan menggunakan alat, benda, dan prosedur yang dibutuhkan secara berkelanjutan masyarakat b) Mengubah keyakinan menjadi fakta dan tindakan efektif, dan menerapkan ekologi pengetahuan untuk praktek desain ekologis c) Menilai dan menyesuaikan penggunaan energi dan sumber daya	a) Peserta didik dapat mempraktekkan tata cara mengelola lingkungan sekitar b) Peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan di sekolah maupun di luar sekolah c) Peserta didik dapat menginformasikan tata cara pelestarian lingkungan
3	Heart (emosional)/civic disposition (watak kewarganegaraan) a) Peduli dan empati untuk orang lain dan lingkungan	a) Peserta didik memiliki kesadaran untuk tidak berperilaku merusak lingkungan

No	Set of Core Competency from The Center for Ecoliteracy	Indikator Keberhasilan
	<p>b) Menghargai perbedaan, bekerja dengan nilai keberagaman yang berbeda latar belakang, motivasi dan tujuan baik</p> <p>c) Berkomitmen untuk keadilan dan peduli kepada sesama</p>	<p>b) Peserta didik menunjukkan perilaku peduli terhadap lingkungan</p> <p>c) Peserta didik berkomitmen untuk mengelola lingkungan dengan bijak</p> <p>d) Peserta didik berkomitmen untuk ikut serta dalam merumuskan pelestarian lingkungan</p>

Sumber: diolah Rondli (2017) dan penulis (2017).

Penyusunan pembelajaran berbasis *ecoliteracy* tersebut akan lebih efektif jika dengan menggunakan metode pembelajaran yang berbasis proyek. Model pembelajaran yang tepat ialah melalui model pembelajaran *project citizen*. Hal ini dikarenakan salah satu keunggulan model ini ialah mampu mengembangkan secara utuh tiga kompetensi kewarganegaraan seperti pengetahuan, ketrampilan dan watak kewarganegaraan dan melibatkan siswa terlibat langsung dalam kebijakan yang lebih tepat dalam isu lingkungan. Hal ini dipekuat oleh Gibson dan Levine (2003:45) menganggap memungkinkan siswa untuk terlibat dalam pekerjaan yang berarti pada isu-isu publik yang serius dengan kemampuan untuk melihat hasil yang positif dalam waktu yang wajar. Selain itu Huckle (1986:15) berpendapat bahwa *project citizen* tentang lingkungan hanya dapat dipelajari dengan berlatih dan langsung proyek untuk mengaktifkan siswa dan memberikan kontribusi untuk masalah nyata yang mempengaruhi masyarakat setempat. Para siswa sendiri percaya bahwa proyek memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara yang bertanggungjawab.

Pengembangan kewarganegaraan ekologi berbasis *ecoliteracy* dan proyek juga dapat mencontoh program *school urban* dari negara-negara maju seperti Jepang, Kanada, Australia dan Amerika. Program ini berbasis proyek antara sekolah formal dengan mitra komunitas lingkungan. Tujuan program ini ialah melibatkan siswa dalam kehidupan nyata untuk berupaya menjaga dan mengelola lingkungan yang baik sehingga siswa tidak hanya paham dan terlibat aktif tetapi juga mampu menghayati dalam bentuk perilaku.

Pembentukan Kewarganegaraan Ekologis Berbasis Masyarakat melalui Komunitas Lingkungan, Workshop dan Pelatihan Pengelolaan Lingkungan yang Ramah Lingkungan

Kewarganegaraan ekologi tidak dapat hanya soal perilaku pribadi, tetapi juga harus memerlukan tindakan kolektif yang bertujuan untuk menghasilkan kondisi sosial, politik dan ekonomi dimana warga memilih untuk bertindak dengan cara yang berkelanjutan (Dobson, 2003:103). Bahkan, partisipasi dan motivasi warga negara diperlukan untuk melindungi lingkungan seperti tindakan kolektif dalam suatu masyarakat. Menerima tanggung jawab pribadi dan bertindak

sesuai tanggung jawab juga membantu meningkatkan kesadaran warga bahwa perilaku dan sikap mereka bisa membuat perbedaan (Light 2001:28).

Uraian di atas jelas menunjukkan bahwa upaya pembentukan kewarganegaraan ekologi tidaklah cukup melalui persekolahan dan pemerintah. Tetapi akan lebih efektif jika didukung oleh pendekatan dari masyarakat. Salah satu contohnya ialah proyek kebun masyarakat dan kebun kewirausahaan yang didukung oleh pemerintah dan masyarakat. Pendekatan ini penting agar mempermudah mencapai tujuan kewarganegaraan ekologi (Certoma, 2015:13; Knap, 2013: 23). Adanya komunitas pecinta lingkungan menunjukkan upaya penyeimbang bagi kelompok tertentu selain sebagai penyeimbang dalam mengelola dan melestarikan ruang hijau sebagai tujuan kewarganegaraan ekologi.

Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kewarganegaraan berbasis masyarakat sangat berperan penting dalam membentuk kewarganegaraan ekologi ialah hasil penelitian tentang Komunitas Bandung Berkebun (Budimansyah dan Prasetyo, 2016:182) yang dilakukan oleh masyarakat peduli lingkungan. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa ada empat tahap meliputi 1) upaya perbaikan dan pelestarian lingkungan salah satunya pengelolaan hasil kebun yang efektif melalui pengetahuan yang memadai dalam pelatihan dan *workshop*; 2) adanya jadwal yang terencana secara berkelanjutan dalam upaya pengembangan ketrampilan warga negara yang mandiri. Istilah yang digunakan ialah ketrampilan lingkungan (*environmental skills*) yang harus mampu mengidentifikasi,antisipasi, mencegah dan mengatasi masalah lingkungan; 3) tahapan ketiga melalui etika lingkungan (*environmental attitudes*) lebih di fokuskan pada nilai yang akan menjadi modal untuk memotivasi peran aktif bagi warga negara melalui *urban farming*, *school urban*, *street urban* dan *campus urban*. Etika lingkungan tersebut haruslah menghormati alam, bertanggung jawab melalui peran aktif; dan 4) kesadaran warga negara terhadap persoalan ekologi melalui partisipasi aktif lingkungan (*environmental skills*). Partisipasi tersebut dalam bentuk tindakan salah satunya pemberian pelatihan mengenai pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan. Salah satu contohnya ialah mengelola limbah sampah yang dapat didaur ulang.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa mengembangkan kewarganegaraan dengan melibatkan masyarakat melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan peduli lingkungan merupakan salah satu strategi yang tepat dalam mencapai tujuan kewarganegaraan ekologis. Strategi yang dapat dilakukan ialah melalui komunitas lingkungan, *workshop* tentang pentingnya pelestarian lingkungan, dan pelatihan mengenai pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan.

Masyarakat tidak hanya paham mengenai isu-isu dan tata cara penegelolaan dan pelestarian lingkungan yang bijak tetapi juga mampu terlibat langsung dalam pelestarian lingkungan sehingga mampu menjadi perilaku nyata yang dilakukan secara sadar dan menjadi pembiasaan.

Kesimpulan

Upaya pembentukan kewarganegaraan ekologis haruslah menjadi tanggung jawab bersama baik oleh pemerintah, persekolahan maupun masyarakat. Hal ini penting bahwa isu mengenai lingkungan menjadi masalah global yang sedang terjadi di seluruh kawasan dunia salah satunya Indonesia. Konsep ekologi sangatlah penting dalam upaya mengembangkan pemikiran ataupun ide yang berkaitan erat dengan tata cara etika dan moral warga negara terhadap lingkungannya secara bertanggungjawab mampu bijaksana dalam menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut ada lima komponen penting mulai dari melek kewarganegaraan, melek ekologi, kesadaran nilai, efikasi diri dan kebijaksanaan praktis.

Penulis berupaya untuk memberikan gambaran strategi pembentukan kewarganegaraan ekologi. Strategi tersebut meliputi 1) pembentukan kewarganegaraan ekologis melalui persekolahan mulai dari peningkatan pemahaman guru tentang melek ekologi, pembentukan kewarganegaraan ekologis melalui pembelajaran PKn persekolahan berbasis *ecoliteracy* dan proyek di luar kelas dan 2) Pembentukan kewarganegaraan ekologis melalui masyarakat dalam bentuk komunitas atau penggiat lingkungan untuk mencapai tujuan kewarganegaraan ekologi.

Daftar Pustaka

Barry, John. (2006). Resistance is fertile: From environmental to sustainability citizenship. In, Andrew Dobson and Derek Bell (eds.), *Environmental Citizenship*. Cambridge, MA: The MIT Press.

Beckford, C. (2008). Re-orienting environmental education in teacher education programs in Ontario. *Journal of Teaching and Learning*, 5 (1) pp. 55–66.

Berkowitz, A. J., Ford, M. A., & Brewer, C. A. (2005). A framework for integrating ecological literacy, civics literacy, and environmental citizenship in environmental education. In E. A. Johnson & M. J. Mapping (Eds.), *Environmental education and advocacy: Changing perspectives of ecology and education* (pp. 227–266). Cambridge: Cambridge University Press

Certoma, C. & Notteboom, B. 2015. Informal planning in a transactive governmentality: Re-reading planning practices through Ghent's community gardens. *Planning Theory*:1-24.

Clarke, L., & Agyeman, J. (2011). Shifting the balance in environmental governance: Ethnicity environmental citizenship and discourses of responsibility. *Antipode*, 43 (1) Pp. 1773–1800

Cogan, JJ and Ray Derricott (eds) (1998). *Citizenship for the 21 century: an international perspective on education*. London: Kogan Page.

Core Competencies for Ecoliteracy. Tersedia On Line di <http://www.ecoliteracy.org/discover/competencies> (diakses tanggal 17 Oktober 2016 pukul 08.55 WIB)

Curtin, D. (2002) Ecological citizenship. Dalam Isin, E.F. dan Turner, B.S. (eds). *Handbook of citizenship studies*. New Delhi: SAGE Publications.

Dewey, John. (1916). *Demokrasi dan pendidikan*. New York: Macmillan.

Dobson, Andrew. 2003. *Citizenship and the Environment*. Oxford: Oxford University Press.

Ferreira, J., Ryan, E., Davis, J., Cavanagh, M., & Thomas, J. (2009). Mainstreaming sustainability in pre-service teacher education in Australia. Canberra: Australian Government Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts (DEWHA) and the Australian Research Institute in Education for Sustainability (ARIES)

Gabrielson, T., & Cawley, R. M. (2010). Plain member and citizen: Aldo Leopold and environmental citizenship. *Citizenship Studies*, 14 (1). Pp. 605–615.

Gebbs, S., Evans, S. M., & Delany, J. E. (2011). Promoting environmental citizenship and corporate social responsibility through a school/industry/university partnership. *Journal of Biological Education*, 45 Pp. 13–19

Gibson, Cynthia & Peter Levine. (2003). *The civic mission of schools*. New York and Washington, DC: The Carnegie Corporation of New York and the Center for Information and Research on Civic Learning.

- Gooch, M., Rigano, D., Hickey, R., & Fien, J. (2008). How do primary pre-service teachers in a regional Australian university plan for teaching, learning and acting in environmentally responsible ways? *Environmental Education Research*, 14 (1). Pp. 175–186.
- Hart, P. (2003). *Teachers' thinking in environmental education*. New York, NY: Peter Lang
- Huckle, J. 1986. Geographical education for environmental citizenship. *Geographical Education* 5(2), Pp. 13–20.
- Hungerford, H.R. and T.L. Volk. 1990. Changing learner behavior through environmental education. *Journal of Environmental Education* 21, 3(1) Pp. 8–21.
- Kelly, R, J,. (2012). Fostering ecological citizenship: the case of environmental service-learning in Costa Rica. *International journal for the scholarship of teaching and learning*. 6 (2). Pp. 1-19
- Kemendikbud (2016) Kompetensi inti dan kompetensi dasar SMP/MTS
- Knapp, L. 2013. *Implementing urban agriculture in Europe: A case study of urban agriculture projects in the Netherlands and Switzerland*. Tesis tidak diterbitkan. Wageningen: Wageningen University and Research Centre.
- Latta, A. (2007). Environmental citizenship: A model linking ecology with social justice could lead to a more equitable future. *Alternatives Journal*, Pp. 33,18–19.
- Light, Andrew. 2001. The urban blind spot in environmental ethics. *Environmental Politics* 10 (1), 7-35.
- Luque, Emilio. 2005. Researching environmental citizenship and its publics. *Environmental Politics* 14(2), pp. 212-225.
- Murray P, et. al (2013). *Civic Education and Competences For Engaging Citizens in democracies*: Strasbourg.: Council Of Europe
- Nagra, V. (2010). Environmental education awareness among school teachers. *Environmentalist*, 30:153-162.
- Prasetyo Wibowo dan Budimansyah, Dasim (2016) Warga Negara dan Ekologi: Studi Kasus Pengembangan Warga Negara Peduli Lingkungan dalam Komunitas Bandung Berkebun. *Jurnal Pendidikan Humaniora* 4 (4). Hal 177-186
- Rondli, W.S. dan Khoirinnida, Yuli. (2017). Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis eco-literacy: upaya rekonstruksi kewarganegaraan ekologis. Hasil prosiding Seminar Nasional aktualisasi kurikulum 2013 di sekolah dasar melalui gerakan literasi sekolah untuk menyiapkan generasi unggul dan berbudi pekerti. Hal 114-122
- Short, P. C. (2010). Responsible environmental action: Its role and status in environmental education and environmental quality. *Journal of Environmental Education*, 41, 34-54.
- Szerszynski, Bronislaw. 2006. Local landscapes and global belonging: Toward a situated citizenship of the environment. In, Andrew Dobson and Derek Bell (eds.), *Environmental Citizenship*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH)
- Yavetz, B., Goldman, D., & Pe'er, S. (2009). Environmental literacy in pre-service teachers in Israel: A comparison between students at the onset and end of their studies. *Environmental Education Research*, 15 (1), Pp: 393–415.